

**PERAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAHAN KELUARGA
(PKK) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang

Oleh :

Fitria Febrianti

217.01.091.006



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

MALANG

2021-2022

RINGKASAN

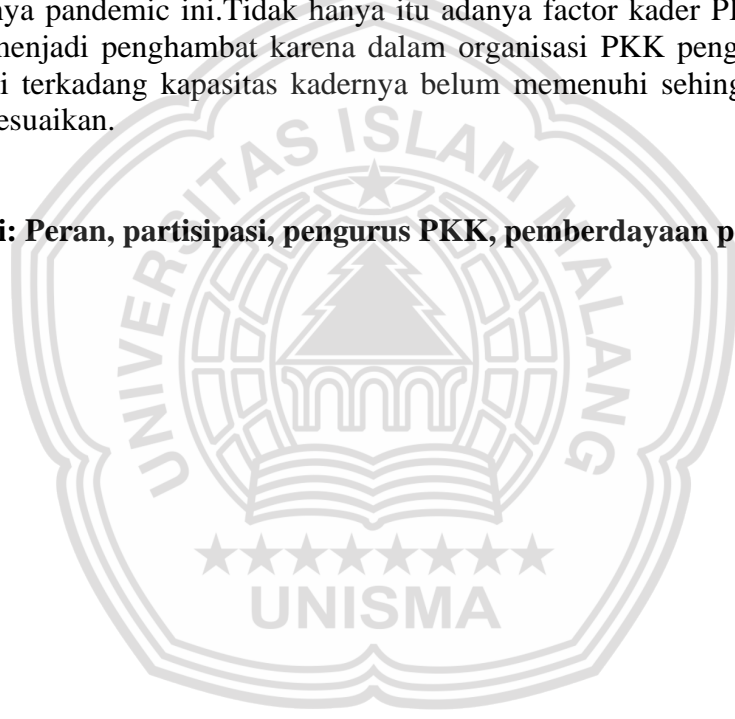
Fitria Febrianti, 2021, NPM 21701091006, Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Peran Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemberdayaan Perempuan Di Kota Malang. Dosen Pembimbing I Dr. Umi Ati, M.AP,

Dosen Pembimbing II Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.AP., M.Pol., Sc.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan perempuan merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh PKK dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki perempuan, agar secara mandiri perempuan mempunyai keterampilan dan keahlian dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi secara mandiri melalui peningkatan kapasitas dan kualitas hidup. Berdasarkan latar belakang maka penulis menyimpulkan yaitu dengan adanya penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2020 tentang TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan dan adanya fenomena IRT yang awalnya hanya mengurus rumah tangga, dan menghabiskan waktu menonton televisi dan berbincang-bincang sesuatu yang tidak bermanfaat. Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka penulis menyimpulkan pokok permasalahan yaitu: 1) Tim Penggerak PKK dalam meningkatkan partisipasi pemberdayaan perempuan 2) faktor pendukung yang dihadapi Tim Penggerak PKK Kota Malang 3) faktor penghambat yang dihadapi Tim Penggerak PKK Kota Malang, Penelitian ini dilaksanakan Menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan fokus 1) Peran Tim Penggerak PKK Kota Malang sebagai pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan pokja PKK. 2) Mengetahui faktor pendukung dari LSM, sarana prasarana dan anggaran pengelolaan program 3) Mengetahui faktor penghambat seperti pelaksanaan program era pandemic dan kurangnya profesionalitas kader. Menggunakan teori Soerjono Soekanto (2001 : 261) tentang Peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Untuk mengetahuinya digunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu peran Tim Penggerak PKK ditunjuk sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK yang dibagi menjadi 4 kelompok kerja sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bertujuan pada meningkatkan partisipasi pemberdayaan perempuan di Kota Malang. Kebijakan atau keterlibatan pemerintah dalam PKK yang berupaya meningkatkan partisipasi pemberdayaan perempuan di Kota Malang sudah

cukup efektif dalam penangannya. Partisipasi Keaktifan Masyarakat dalam Kegiatan Setiap Pokja PKK. Partisipasi masyarakat dapat terlihat dengan adanya musyawarah mufakat anggota PKK. Keberhasilan dapat dilihat dari suatu program PKK, bagaimana bentuk dan hasilnya tidak dapat dilepaskan oleh adanya hasil putusan yaitu melalui tahapan pengambilan keputusan. Maka keterlibatan masyarakat sangatlah dibutuhkan mengingat ide-ide atau pemikiran dapat menjadi bahan pertimbangan. Terdapat factor penghambat dalam pelaksanaan program kerja yaitu selama adanya pandemi covid-19 pemerintah kota malang membuat kebijakan dengan memberikan program kerja secara online agar masyarakat merasa lebih dimudahkan dalam pelaksanaan program kerja dan meminimalisir penggerombolan saat pelaksanaan program kerja. Namun program kerja yang telah direncanakan ada beberapa yang ditunda atau bahkan dibatalkan karena adanya pandemic ini. Tidak hanya itu adanya factor kader PKK yang kurang kompeten menjadi penghambat karena dalam organisasi PKK pengurus merupakan relawan jadi terkadang kapasitas kadernya belum memenuhi sehingga anggota lain harus menyesuaikan.

Kata Kunci: Peran, partisipasi, pengurus PKK, pemberdayaan perempuan



SUMMARY

Fitria Febrianti, 2021, NPM 21701091006, State Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, The Role Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) in Increasing Women's Empowerment Participation in Malang City. Advisor I Dr. Umi Ati, M.AP, Advisor II Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.AP., M.Pol.,Sc

This research was conducted to determine the role of Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) in empowering women, which are all actions taken by PKK with the aim of increasing the abilities and potentials of women, so that women independently have the skills and expertise in dealing with the problems they face independently through increasing capacity and quality of life. Based on the background, the authors conclude, namely: 1) With the issuance of the Ministry of Home Affairs Regulation Number 36 of 2020 concerning TP PKK is a partner of the government and community organizations/institutions. 2) There is a phenomenon of IRT which initially only takes care of the household, and spends time watching television and talking about things that are not useful. (3) The role of all PKK administrators from working groups 1-4 according to the field. Based on the description of the background, the authors conclude that the main problems are: 1) the PKK Mobilizing Team in increasing the participation of women's empowerment 2) the supporting factors faced by the Malang City PKK Mobilizing Team 3) the inhibiting factors faced by the Malang City PKK Mobilizing Team. type of descriptive research with a qualitative approach. With a focus 1) The role of the Malang City PKK Mobilizing Team as human resource development through PKK working group activities. 2) Knowing the supporting factors of NGOs, infrastructure and program management budgets. 3) Knowing the inhibiting factors such as the implementation of the pandemic era program and the lack of professionalism of cadres. Using the theory of Soerjono Soekanto (2001: 261) about the role is a dynamic aspect in the position of something. If a person performs his rights and obligations according to his position, then he carries out a role. To find out this type of qualitative research is used with interview, observation, and documentation data collection techniques. The results showed that there were 4 working groups according to their functions to increase women's empowerment participation and support from the government. There are NGOs and other women's organizations that help achieve women's empowerment. Adequate facilities and infrastructure as well as work program budgets that support the achievement of women's empowerment namely the implementation of the program in the midst of a pandemic. The results of the research are that the role of the PKK Mobilizing Team is appointed as a partner of the

government and other community organizations/institutions, which function as facilitators, planners, implementers, controllers and movers at each level for the implementation of the PKK program which is divided into 4 working groups according to their functions to improve human resources with the aim of increasing the participation of women's empowerment in the city of Malang. The government's policy or involvement in the PKK that seeks to increase the participation of women's empowerment in the city of Malang has been quite effective in handling it. Participation of Community Activities in the Activities of Every PKK Pokja. Community participation can be seen in the consensus deliberation of PKK members. Success can be seen from a PKK program, how its form and results cannot be separated from the results of the decision, namely through the stages of decision making. So community involvement is really needed considering that ideas or thoughts can be taken into consideration. There is an inhibiting factor in the implementation of the work program, namely during the Covid-19 pandemic, the Malang city government made a policy by providing online work programs so that people felt it was easier to implement work programs, and minimize clustering during the implementation of work programs. However, some of the work programs that have been planned have been postponed or even canceled due to this pandemic. Not only that, the factor of incompetent PKK cadres is an obstacle because in the PKK organization the administrators are volunteers, so sometimes the capacity of the cadres has not been fulfilled so other members have to adjust.

Keywords: Role, participation, PKK management, women's empowerment

BAB I

PENDAHULUAN

A.Konteks Penelitian

Di Dunia ini tuhan telah menciptakan segala sesuatu yang baik didalamnya termasuk pada manusia, ada laki-laki dan perempuan yang telah diciptakan berpasangan. Dengan tujuan supaya alam semesta ini berjalan harmonis. Tetapi pada kenyataannya tidak berjalan seperti demikian, perempuan sampai saat ini masih saja banyak yang mengalami diskriminasi. Kemampuan dalam diri perempuan masih saja diragukan dengan dalih jenis kelamin yang berbeda menganggap kaum laki-laki masih unggul di dalam segala hal. Perempuan selalu diidentifikasi dengan sosok yang lemah-lembut, keibuan, penyayang, dan penuh perhatian . Hal-hal ini seolah-olah sudah menjadi pemberian tuhan dalam kodrat sebagai perempuan. Padahal tidaklah demikian jenis kelamin atau seksual memanglah merupakan suatu pemberian Tuhan tapi berbeda dengan gender.

Hal ini jelas merepresentasikan peran perempuan di dalam sebuah keluarga, bahwasanya tugas perempuan itu hanya dalam ranah mengurus keuangan, dan dalam tataran rumah tangga saja. Sebenarnya posisi sebagai seorang pemimpin untuk saat ini bukan hanya diperuntukkan bagi kalangan laki-laki, bahkan sekarang posisi sebagai seorang pemimpin sudah terbuka lebar bagi kalangan perempuan. Hal itu sangat jelas sekali terlihat dalam ideologi bangsa kita yaitu yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila pada sila ke-5, yang menyebutkan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia”. Dari sila ke-5 tersebut sangat jelas bahwa ideologi bangsa ini menyiratkan akan kesetaraan hak bagi seluruh kaum, baik itu perempuan maupun laki-laki. Hak dan kewajiban bukan hanya dimiliki oleh satu kalangan tertentu, akan tetapi diperuntukkan bagi setiap elemen masyarakat.

Menurut vitalaya (2010:156) Perempuan dalam pembangunan bangsa pada hakikatnya adalah upaya peningkatan kedudukan (status), peran, kemampuan, kemandirian, dan ketahanan mental, serta spiritual, perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Sejalan dengan itu, peran perempuan juga diarahkan antarlain, pada upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas dan kemandirian serta kemajuan sumberdaya manusia, masyarakat dan bangsa Indonesia, serta mendorong dan meningkatkan peserta aktif dan swadaya seluruh masyarakat.

Pemberdayaan muncul sebagai solusi atas fakta ketimpangan struktur kekuasaan dalam mengatur diri mereka sendiri. Pemberdayaan pada intinya bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Individu dapat menentukan pilihan dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Individu dapat menunjukkan bahwa setiap manusia dalam hal ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Menurut Hardjito Notopuro (1984:28) dalam rangka mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan maka perlu dikembangkan kegiatan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga antarlain melalui pemberdayaan.

Memberdayakan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan dari segala bidang sektor kehidupan. Menurut

Nyoman, Suartha (2015:21) memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk kemudian dapat melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Wrihatnolo dan Nugroho dalam buku Nyoman, Suartha (2015:21) , bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak, untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumberdaya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas dengan manfaat darinya.

Menurut Hardjito Notopuro (1984:28) Dalam upaya memberdayakan perempuan yang diperjuangkan adalah dipenuhinya hak perempuan untuk menentukan pilihan dalam kehidupan dan untuk mempengaruhi arah perubahan melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol atas sumber daya material dan non material yang penting. Pendekatan pemberdayaan sekali lagi tidak menekankan pentingnya peningkatan “status” perempuan secara relatif terhadap kaum pria, tetapi berupaya memberikan kekuasaan pada perempuan melalui pendistribusian kekuasaan di dalam dan di antara masyarakat. Dalam rangka mendorong partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan maka perlu dikembangkan kegiatan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga antarlain melalui organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah organisasi masyarakat yang ada di Desa, dan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat serta memberdayakan masyarakat. Menurut sejarahnya, PKK semula merupakan akronim dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang bertujuan untuk melibatkan partisipasi perempuan melalui program pendidikan perempuan. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1972 organisasi tersebut berubah nama menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang bertujuan untuk membina dan membangun keluarga di bidang mental, spiritual, dan fisik serta peningkatan mutu

pangan, sandang, kesehatan, dan lingkungan hidup. Sejak tahun 1999 akronim PKK berubah lagi menjadi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Menurut Aslichati (2011:2) kata pemberdayaan perempuan dipilih karena mengandung pengertian suatu usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam berkehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan perempuan merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh PKK dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki perempuan, agar secara mandiri perempuan mempunyai keterampilan dan keahlian dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi secara mandiri melalui peningkatan kapasitas dan kualitas hidup. Seperti yang dilakukan oleh organisasi PKK di Kota Malang, pemberdayaan yang diterapkan kepada perempuan yang tergabung dalam organisasi PKK yaitu berbagai hal pemberdayaan dalam hal keterampilan.

Menurut Soekanto (1992:272) Program pemberdayaan keterampilan ini lebih ditekankan pada pemberdayaan keterampilan membuat pin dari kain perca, yang dikelola oleh para anggota PKK, dan ibu rumah tangga lainnya diluar organisasi PKK. Perubahan yang terjadi dalam perekonomian keluarga itu semua karena peran ibu rumah tangga, dimana mereka dapat lebih aktif membuat keterampilan diluar ataupun dirumah. Perubahan yang terjadi dalam keluarga adalah perubahan yang dikehendaki atau direncanakan yaitu perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat.

Maka dari itu berikut beberapa hal yang menjadi urgensi bagi peneliti untuk mengangkat topik ini, antara lain :

1. Dengan adanya penerbitan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan Presiden

Nomor 99 Tahun 2017 mengenai gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga bahwa tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

2. Adanya fenomena ibu rumah tangga yang awalnya hanya mengurus rumah tangga, dan menghabiskan waktu untuk menonton televisi di rumah, dan berbincang-bincang sesuatu yang tidak bermanfaat, sekarang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, lebih menguntungkan lagi memiliki penghasilan, dan meningkatkan ekonomi keluarga dalam rangka pemberdayaan perempuan, melalui PKK
3. Peran seluruh pengurus anggota Tim Penggerak PKK yang bertanggung jawab atas Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada kelompok kerja 1 berfokus pada penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong ; kelompok kerja 2 berfokus pada pendidikan dan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi ; kelompok kerja 3 berfokus pada pangan, sandang dan perumahan dan tata laksana rumah tangga ; kelompok kerja 4 berfokus pada Kesehatan, kelestarian lingkungan dan lingkungan sehat.

Dengan adanya pemberdayaan perempuan melalui tim penggerak PKK ibu rumah tangga akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan dapat

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, lebih menguntungkan lagi memiliki penghasilan, dan meningkatkan ekonomi keluarga. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dalam rangka pemberdayaan perempuan, melalui tim penggerak PKK menjadi cukup penting dilakukan agar terciptanya kesejahteraan keluarga. Melihat permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemberdayaan Perempuan di Kota Malang “**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran Tim Penggerak PKK dalam meningkatkan partisipasi pemberdayaan perempuan di Kota Malang ?
2. Apa faktor pendukung yang dihadapi Tim Penggerak PKK Kota Malang dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan?
3. Apa faktor penghambat yang dihadapi Tim Penggerak PKK Kota Malang dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah suatu pemutusan suatu konsentrasi pada tujuan suatu penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian merupakan garis dari pengamatan

suatu penelitian sehingga observasi dan analisa yang akan dilakukan menghasilkan hasil yang lebih tertera. Menurut Andi (2014:47) Fokus penelitian merupakan adanya dari suatu permasalahan yang paling utama dan akan menjadi objek suatu penelitian tersebut. Masalah masalah utama tersebut yang akan dijadikan suatu acuan utama dan akan dijadikan arahan bagi peneliti yang akan dilakukan. Perumusan fokus masalah dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menyempurnakan rumusan masalah atau fokus permasalahan yang masih tetap dilakukan saat penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini yang dijadikan fokus penelitian yaitu :

1. Peran Tim Penggerak PKK dalam meningkatkan partisipasi pemberdayaan perempuan di Kota Malang, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK yang berfokus pada:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan pokja PKK yaitu:
★★★★★★★★★★★★★★★★
Pokja I : a. Bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
b. Bidang Gotong Royong.
Pokja II : a. Bidang Pendidikan dan Keterampilan; b. Bidang Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
Pokja III : a. Bidang Pangan; b. Bidang Sandang; c. Bidang Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga.

- Pokja IV : a. Bidang Kesehatan; b. Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup; c. Perencanaan Sehat.
- b. Adanya program-program pemerintah yang sejalan dan bersinergi dengan rencana strategis program Gerakan PKK
 - c. Partisipasi keaktifan masyarakat dalam kegiatan setiap pokja PKK
2. Mengetahui faktor pendukung yang dihadapi Tim Penggerak PKK Kota Malang dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan yang telah terlampir dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
 - a. Adanya berbagai LSM dan kelembagaan lain yang mempunyai kegiatan sejenis/mendukung program Gerakan PKK
 - b. Sarana dan prasarana.
 - c. Anggaran Pengelolaan Program
 3. Mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi Tim Penggerak PKK Kota Malang dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Kota Malang.
 - a. Pelaksanaan program kerja selama pandemic.
 - b. Kader-kader PKK yang kurang kompten.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui peran Tim Penggerak PKK dalam meningkatkan partisipasi pemberdayaan perempuan di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung yang dihadapi Tim Penggerak PKK Kota Malang dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Kota Malang.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Tim Penggerak PKK Kota Malang dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Kota Malang.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini merupakan upaya pembelajaran dan pemahaman Tim Penggerak PKK dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan di Kota Malang
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang peran Tim Penggerak PKK dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan di masyarakat.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki topik sama tentang peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan untuk menjadi bahan kajian pustaka dalam penyusunan penelitian.

4. Secara praktis, penelitian ini diajukan sebagai syarat yang harus penulis penuhi untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dari jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang sekaligus tugas terakhir penulis sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Publik.



BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peran tim penggerak PKK dalam meningkatkan partisipasi pemberdayaan perempuan Kota Malang, peneliti memberi kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Tim Penggerak PKK ditunjuk sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK yang dibagi menjadi 4 kelompok kerja sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bertujuan pada meningkatkan partisipasi pemberdayaan perempuan di Kota Malang yang dibagi menjadi 4 pokja yaitu:
 - a. Pokja I : Bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
pokja 1 mempunyai peran untuk membantu pemerintah dalam pengembang potensi masyarakat khususnya keluarga, serta penggerak prakarsa, gotong royong dan swadaya perempuan dalam pembangunan.
 - b. Pokja II : a. Bidang Pendidikan dan Keterampilan; b. Bidang Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

pokja 2 pada dasarnya sudah melaksanakan tugas di bidang pendidikan dan kooperasi dengan baik mengelola gerakan PKK dengan profesional, mampu melaksanakan tugas dan fungsinya selaku perencana program. Program kerja telah dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur yang telah diterapkan..

c. Pokja III : a. Bidang Pangan; b. Bidang Sandang;

Dapat diketahui bahwa PKK khususnya pokja 3 sebagai fasilitator dan pengendali program kerja PKK dalam bidang sandang dan pangan. mempunyai peran untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kreatifitas dan inovasi masyarakat.

Pokja IV : a. Bidang Kesehatan; b. Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup;
c. Perencanaan Sehat.

Pokja 4 mempunyai peran untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesadaran kesehatan keluarga dan lingkungan sebagai pengembang potensi masyarakat khususnya keluarga, serta penggerak prakarsa, gotong royong dan swadaya perempuan dalam meningkatkan kesadaran dalam lingkungan hidup

2. Kebijakan atau keterlibatan pemerintah dalam PKK yang berupaya meningkatkan pasrtisipasi pemberdayaan perempuan di Kota malang sudah cukup efektif dalam penangannya, Pemerintah juga menjadi factor terpenting

dalam menjalankan program PKK yang sudah direncanakan sesuai pokja masing-masing

3. Partisipasi Keaktifan Masyarakat dalam Kegiatan Setiap Pokja PKK. Partisipasi masyarakat dapat terlihat dengan adanya musyawarah mufakat anggota PKK. Keberhasilan dapat dilihat dari suatu program PKK, bagaimana bentuk dan hasilnya tidak dapat dilepaskan oleh adanya hasil putusan yaitu melalui tahapan pengambilan keputusan. Maka keterlibatan masyarakat sangatlah dibutuhkan mengingat ide-ide atau pemikiran dapat menjadi bahan pertimbangan.

Terdapat faktor pendukung TP PKK Kota Malang dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan untuk pelaksanaan program pendidikan dan keterampilan, kesadaran masyarakat yang menyatakan tanggapan bahwa kegiatan ini sangat baik dan bagus, tempat pelaksanaan kegiatan, dan dukungan pemerintah. Berikut factor pendukung yaitu :

1. keterlibatan LSM atau kelembagaan lain yang berupaya meningkatkan partisipasi pemberdayaan perempuan di Kota Malang Keterlibatan dari anggota masyarakat dalam proses kegiatan LSM dan kelembagaan lain wajib adanya, karena tanpa itu maka program kerja dari PKK nantinya akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bentuk kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia di TP PKK Kota Malang dilakukan untuk mewujudkan program kerja yang lebih baik

lagi dan bisa memuaskan masyarakat dalam menerima manfaat di TP PKK Kota Malang. Sarana dan prasarana dalam proses organisasi sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana secara efektif dan efisien untuk memberikan layanan secara profesional sesuai dengan bidangnya dalam proses kegiatan yang efektif dan efisien pula.

3. Anggaran pengelolaan program kerja yang disalurkan pemerintah sudah cukup membantu dalam pelaksanaan program kerja di setiap pokja, meskipun dilapangan yang dilihat oleh peneliti ada sebagian kegiatan yang sumber dananya berdasarkan iuran warga setempat seperti posyandu dan pos paud. Karena para kadernya adalah tenaga ahli dibidangnya dan mendapatkan insentif dari pemerintah tapi dirasa kurang cukup sehingga iuran warga yang menjadi solusinya dengan membayar seikhlasnya.

Terdapat factor penghambat dalam pelaksanaan program kerja yaitu selama adanya pandemi covid-19 pemerintah kota malang membuat kebijakan dengan memberikan program kerja secara online agar masyarakat merasa lebih dimudahkan dalam pelaksanaan program kerja dan meminimalisir penggerombolan saat pelaksanaan program kerja. Namun program kerja yang telah direncanakan ada beberapa yang ditunda atau bahkan dibatalkan karena adanya pandemic ini. Tidak hanya itu adanya factor kader PKK yang kurang kompeten menjadi penghambat karena dalam organisasi PKK pengurus merupakan relawan jadi terkadang kapasitas kadernya belum memenuhi sehingga anggota lain harus menyesuaikan. Kader-kader wilayah PKK

merupakan lansia namun mempunyai semangat kerja yang tinggi meskipun masih kurang mumpuni untuk teknologi sehingga lapran yang seharusnya di sampaikan secara digital menjadi ditulis tangan.

B. Saran

1. Pelaksanaan Program Kerja Selama Pandemi Covid 19

Pelaksanaan program kerja selama adanya pandemi covid-19 pemerintah kota malang membuat kebijakan dengan memberikan program kerja secara online meminimalisir penggerombolan saat pelaksanaan program kerja. Namun program kerja yang telah direncanakan ada beberapa yang ditunda atau bahkan dibatalkan karena adanya pandemic ini. Adapun saran peneliti dari factor penghambat ini sebaiknya program kerja tetap dilaksanakan mengingat adanya anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah dengan tetap menerapkan protocol kesehatan yang sudah diterapkan sehingga diharapkan pada era pandemic ini program kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan laporan kegiatan yang diajukan ke pemerintahan pusat.

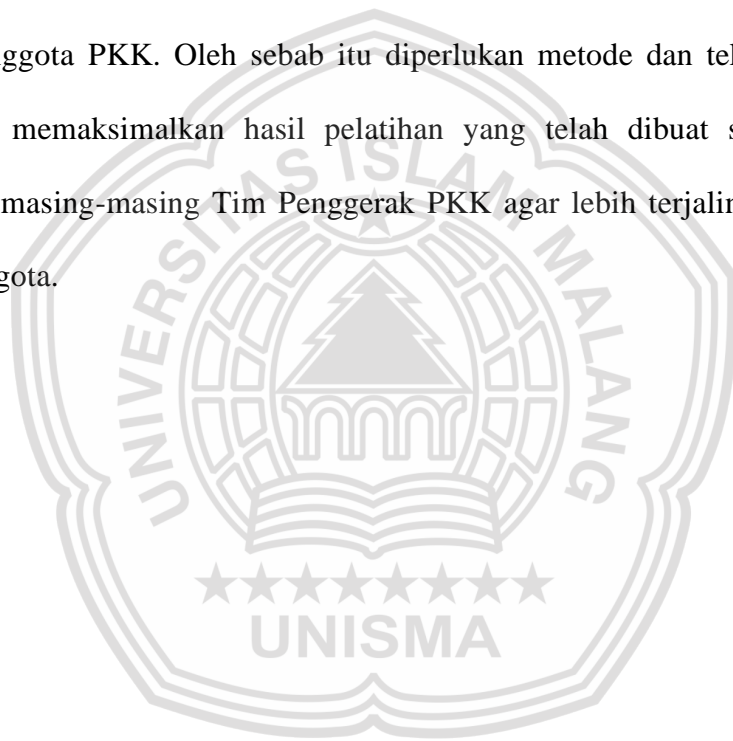
2. Kader PKK yang Kurang Kompeten.

Kader PKK yang kurang kompeten menjadi factor penghambat jalannya proses administrasi dan laporan kegiatan karena kader-kader wilayah PKK merupakan lansia namun mempunyai semangat kerja yang tinggi meskipun masih kurang mumpuni untuk teknologi sehingga laporan yang seharusnya di sampaikan secara digital menjadi ditulis tangan. Adapun saran peneliti dari factor penghambat ini sebaiknya kader PKK

dapat mengadakan pelatihan komputer dan digital mengingat teknologi saat ini semakin berkembang dan sumber daya manusia harus bisa memanfaatkannya, kerja sama sesama anggota harus ada dalam penanganannya.

3. Pelatihan dan pemilihan kader harus tepat sasaran

Pelatihan dan pemilihan kader harus tepat sasaran agar dapat dipahami dengan baik oleh para anggota PKK. Oleh sebab itu diperlukan metode dan teknik yang harus sesuai dan memaksimalkan hasil pelatihan yang telah dibuat serta diperlukan selektifitas masing-masing Tim Penggerak PKK agar lebih terjalannya pendekatan kepada anggota.



Sumber Buku

- Adi Fahrudin, *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*, Bandung Humaniora, 2011
- Adi, Isbandi Rukminto. (2001). *Pemberdayaan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi VI
- BPHN Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Kompendium Tentang Hak-hak Perempuan*
- Edi Suharto, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat*, Bandung : Refika Aditama
- Hubeis Aida Vitalaya S, 2010, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa Ke Masa*, Bogor : IPB Press
- Huraerah, Abu. (2011). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Anggota IKAPI.
- Kartasasmitha Ginandjar, 2007, *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta : Ar Ruzz Media
- Mochamad Ridwan, 2020, *Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Alam Lingkungan*, (Yogyakarta: BILDUNG) hal 22
- Muslim Azis, 2012, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta : Samudra Biru
- Notopuro Hardjito, 1984, *Peranan Wanita Dalam Masa Pembangunan Indonesia*, Jakarta : Balai Aksara
- Prof .Dr.Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2018).
- Soekanto Soerjono, 2001, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Suartha Nyoman, 2015, *Kontribusi Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*, Jakarta : PT RajaGrafindo

Suyanto Bagong & Emy Susanti Hendarso, 1996, *Wanita Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju Ke Pemberdayaan*, Surabaya : Airlangga University Press

Theresia Aprillia, 2015, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung : Alfabeta

Totok Mardikanto dan Poerwakoto Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta, 2012

Zubaedy, 2013, *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Sutedjo, 2006. *Langkah-langkah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)*, Jakarta : Azka Press.

Adiyoso, W. (2009). *Mengugat perencanaan Partispasidalam Pemberdayaan. Masyarakat* . Surabaya:2004

Sumber Jurnal dan Skripsi

Aslichati Lilik, 2011, *Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan*, Jurnal Vol. 7 No. 1

Barus Rehia K. I, 2015. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Media Sosial*, Jurnal Vol. 1 No. 2

Ganjar Gagan & Mukran Roni, 2015 *Pemberdayaan Perempuan Melalui Daya Saing Produk Berbahan Ramah Lingkungan dan UKM*, Jurnal Vol 1 No. 2

Suryana, Sawa. (2010). *Pemberdayaan Masyarakat*. Semarang: Unnes Press.

Tim Penggerak PKK Pusat, 2015, *Pemberdayaan dan Kesejahteraan PKK*, Jakarta : Tim Penggerak Pusat.

Sumber undang-undang

Keppres Nomor 134 Tahun 1999 Kementerian Pemberdayaan Perempuan

Peraturan Pelaksanaan peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 mengenai gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga



Peraturan kemendagri Nomor 36 Tahun 2020 tentang TP PKK sebagai mitra pemerintah

Sumber Internet

Anonim. (2006). Empowerment and Urban Poverty Alleviation in Indonesia. (Online). [http://wordpress.com/2006/11/20/empowerment-and-urbanpoverty alleviation-in-indonesia/](http://wordpress.com/2006/11/20/empowerment-and-urbanpoverty%20alleviation-in-indonesia/) diakses pada 12 februari 2021



